

Perlakuan Akuntansi Terhadap Selisih Kas Pada Neraca Laporan Keuangan Unit Daringan BUMDes Kesongo

Gabriella Stefany, Ronny Prabowo

Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
Jl Diponegoro No 52-60, Salatiga, 50711, Indonesia

Article info

Keywords:
BUMDes, Cash different, and
Cash opname

Kata Kunci:
BUMDes, Cash opname, dan
Selisih kas

ISSN (print): 2598-7763
ISSN (online): 2598-7771

✉ **Corresponding Author:**
Name: Ronny Prabowo
Tel./Fax. No.
E-mail: ronny.prabowo@uksw.edu

Pendahuluan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu unit ekonomi yang berfokus pada kepentingan masyarakat. Keberadaan BUMDes sangat berdampak positif bagi masyarakat desa.

Abstract

This study aims to determine the causes of cash differences that occurred in the Daringan unit of BUMDes Kesongo for the period August-December 2021. Data collection is carried out by requesting evidence of incoming and outgoing transactions per day, conducting cash opname, and reconfirming by comparing with previous reports, and then discussing with the management of the daringan unit. Cash opname is carried out by making general journals and if there are differences, more in-depth observations will be made by conducting interview techniques and data analysis is carried out using descriptive techniques. This research was conducted with 3 activity streams of data analysis activities, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing or verification. The results showed that the final balance after cash opname was Rp. 43,264,893. The difference reported is Rp. 88 for the balance at the bank with details of the balance of only Rp. 43,264,805 and the difference in the balance in hand of Rp. 24,693 with details of the balance of Rp. 43,240,200. The cash difference is not recorded in accordance with applicable accounting principles due to the lack of understanding of BUMDes financial managers regarding the recording of existing cash difference transactions.

Citation: Gabriella Stefany, Ronny Prabowo, (2023). Perlakuan Akuntansi Terhadap Selisih Kas Pada Neraca Laporan Keuangan Unit Daringan BUMDes Kesongo. *AFRE Accounting and Financial Review*, 6(1): 95-105

Abstraks

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya selisih kas yang terjadi pada unit Daringan BUMDes Kesongo periode Agustus-Desember 2021. Pengumpulan data dilakukan dengan meminta bukti-bukti transaksi masuk dan keluar per hari, melakukan cash opname, dan mengkonfirmasi kembali dengan cara membandingkan dengan laporan sebelumnya, dan selanjutnya didiskusikan dengan pengurus unit daringan. Cash opname dilakukan dengan membuat jurnal umum dan jika terdapat perbedaan akan dilakukan observasi lebih mendalam dengan melakukan teknik wawancara dan analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan 3 alur kegiatan dari aktivitas analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan saldo akhir yang setelah dilakukan cash opname sebesar Rp. 43.264.893. Selisih yang dilaporkan sejumlah Rp. 88 untuk saldo di bank dengan rincian saldo hanya sebesar Rp. 43.264.805 dan selisih saldo ditangan sebesar Rp. 24.693 dengan rincian saldo Rp. 43.240.200. Selisih kas tersebut tidak dicatat sesuai dengan kaidah akuntansi yang berlaku karena kurangnya pemahaman pengelola keuangan BUMDes terkait pencatatan transaksi selisih kas yang ada.

JEL Classification:
DOI: <https://doi.org/10.26905/afr.v6i1.9788>

Potensi desa dengan beragam inovasi mampu menciptakan lingkungan desa mandiri yang tidak bergantung dengan dana subsidi pemerintah. BUMDes dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat. Setiap program yang dilakukan oleh

BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa. BUMDes harus mengetahui potensi desa yang bisa dikembangkan sehingga akan memperoleh keuntungan yang akan dirasakan oleh semua pihak, seperti pihak desa dan juga masyarakat yang ada di desa tersebut (Sidik, 2015; Prasetyo, 2016; Anggraeni, 2016; Faedlulloh, 2018 Hamzah *et al.*, 2019; Pradnyani, 2019; Wibowo & Alfariy, 2020 Riyanti & Adinugrah, 2021; dan Ridwan *et al.*, 2021). BUMDes dikatakan berhasil apabila ukuran dan tujuannya realistis dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tujuan dari BUMDes adalah memperoleh keuntungan atau laba bersih melalui pengelolaan usaha, produktivitas perekonomian dan potensi desa. Peran masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai tujuan yang tepat sasaran.

Pengelolaan program BUMDes tidak terlepas dari masalah dan kekurangan. Banyak aspek yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan BUMDes, salah satunya permasalahan yaitu keuangan (Agunggunanto *et al.*, 2016; Wahyuningsih & Pradana, 2021; Hapsari *et al.*, 2021; Kustinah *et al.*, 2022; Wirandini & Prasetya, 2022; dan Mawardi & Firmansyah, 2023). Masalah keuangan merupakan masalah riil dalam kegiatan BUMDes yang sangat menarik untuk dipecahkan. Pengelolaan keuangan akan mudah dilakukan jika pemahaman mengenai perencanaan dan pencatatan akuntansi dikuasai. Pemahaman yang baik sangat membantu dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan yang benar. Suatu laporan keuangan memiliki prinsip dasar keseimbangan di setiap hasil akhirnya. Prinsip keseimbangan merujuk pada kesesuaian jumlah saldo akun pada sisi debit dan sisi kredit yang harus menunjukkan jumlah yang sama. Laporan keuangan sangat perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi dari suatu perusahaan ataupun organisasi. Informasi yang didapatkan dari laporan keuangan akan mempermudah dalam pengambilan kebijakan manajemen yang berguna untuk perkembangan perusahaan (Pamungkas & Kristianti, 2019; Astuti *et al.*, 2020; Penatari *et al.*, 2020; Puspitasari, 2021; Sulistiani, 2021; dan Yanti & Pratiwi, 2022). Laporan keuangan yang tidak seimbang (tidak *balance*) menandakan bahwa terdapat kesalahan dalam pencatatan laporan keuangannya.

BUMDes memiliki kewajiban untuk melaporkan keuangan mereka baik yang berkaitan dengan kas masuk maupun kas keluar yang digunakan dalam operasional BUMDes sebagai

bentuk tanggung jawab atas dana permodalan yang diberikan (Usman, 2023). Pelaporan keuangan yang dimiliki BUMDes banyak dijumpai hanya dicatat dengan metode tradisional yakni menuliskan kas masuk dan kas keluar saja yang dapat menimbulkan adanya ketidaksesuaian antara kas fisik dan kas di buku. Metode pencatatan yang sederhana ini juga dapat menyebabkan kesalahan ataupun kekeliruan dalam pencatatan laporan keuangan (Erlina & Sirojuzilam, 2020; Putri *et al.*, 2021; Widiastuti *et al.*, 2022; dan Nursidaa *et al.*, 2023). Kurangnya literasi dalam proses pencatatan administrasi yang baik dan benar menjadi yang terus menerus terulang khususnya dalam dalam pengelolaan keuangan BUMDes (Zulbetti *et al.*, 2019; Kesa, 2019; Darnilawati *et al.*, 2021; dan Septina *et al.*, 2021). Pengurus BUMDes cenderung dipilih berdasarkan tingkat kepercayaan ketua BUMDes tanpa melihat latar belakang pendidikan pengurus keuangannya sehingga pengetahuan administratif menjadi sangat kurang dan hal inilah yang menyebabkan banyak BUMDes di Indonesia mengalami kemunduran dalam pelaporan keuangan mereka.

Salah satu BUMDes yang mengalami kendala dalam mengelola laporan keuangan adalah BUMDes Kesongo khususnya pada Unit Daringan. Unit Daringan bertempat di Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Unit ini merupakan unit baru yang mulai beroperasi sejak saja tanggal 15 Agustus 2021 dan terhitung sebagai unit baru bagi BUMDes Kesongo. Unit ini bergerak dibidang kuliner. Dalam menjalankan unit usahanya, makanan / minuman yang diperjualbelikan merupakan titipan pedagang yang merupakan warga desa Kesongo. Kemampuan mengembang usaha, perencanaan, dan pengelolaan keuangan akan memperlancar keadaan perusahaan (Mukhzarudfa *et al.*, 2021). Dengan usianya yang terbilang baru, unit ini diharapkan dapat tumbuh dan berkembang. Pengurus unit Daringan dalam operasionalnya merasa kebingungan dalam pencatatan laporan keuangannya. Salah satu masalah yang timbul dalam operasional mereka adalah masalah selisih kas. Masalah selisih kas seringkali menjadi tantangan bagi pengurus unit Daringan dan akhirnya mau tidak mau pengurus tersebut akan mengganti jumlah selisih kas yang ada.

Dalam akuntansi apabila kas menurut perhitungan fisik lebih besar dari catatan buku maka disebut sebagai selisih kas lebih, namun

bila jumlah kas di fisik atau ditangan lebih kecil dari catatan buku maka disebut selisih kas kurang (Muna & Harris, 2018); (Budiarto *et al.*, 2020); (Yuliana *et al.*, 2022)

Jenis selisih kas yang ada pada kasus unit Daringan lebih mengarah kepada selisih kas kurang. Pencatatan akuntansi yang tidak sesuai ini menimbulkan konflik yang mempengaruhi manajemen internal dari BUMDes sehingga pencatatan selisih kas harus diperbaiki agar tidak timbul konflik internal pengurus BUMDes. Dari adanya fenomena tersebut terdapat rumusan persoalan penelitian yang perlu dikaji, yaitu bagaimana bentuk penyelesaian selisih selisih kas dalam pencatatan laporan keuangan dan bagaimana penanggulangan yang tepat terkait aktivitas selisih kas yang terjadi pada unit daringan BUMDes Kesongo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya selisih kas yang terjadi pada unit Daringan BUMDes Kesongo periode Agustus-Desember 2021. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya selisih kas pada neraca laporan keuangan periode Agustus-Desember 2021 pada unit daringan BUMDes Kesongo dan pengendalian yang tepat atas fenomena tersebut. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemampuan untuk bisa menyusun laporan keuangan dengan baik.

2. Literatur Review

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat desa (Agunggunanto *et al.*, 2016; Hidayah *et al.*, 2019; Kania *et al.*, 2019; Rahmawati, 2020; dan Dwiningwarni & Amrulloh, 2020); dan Zulgani *et al.*, 2023). BUMDes merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan dikelola oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat desa. Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dijadikan landasan hukum atas pendiriannya. Pengelolaan yang baik sangat berdampak bagi kelangsungan BUMDes (Hamzah *et al.*, 2019). BUMDes memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat desa. Potensi sumber daya alam yang menjadi kebutuhan masyarakat meru-

upakan alat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa yang perlu di optimalkan. BUMDes wajib memberikan laporan tentang keuangan untuk diserahkan dan kemudian dipertanggungjawabkan. Laporan ini bertujuan untuk menilai kinerja dari pengurus dan dijadikan bahan acuan untuk evaluasi. Laporan yang dibuat berupa neraca, laporan neraca, dan laporan arus kas.

BUMDes menjalankan perannya dengan membentuk unit-unit usaha. Unit usaha ini digunakan untuk memaksimalkan kinerja dari pengurus. Perkembangan BUMDes di Indonesia saat ini khususnya di daerah Jawa Tengah, sangat pesat sekali. Keberadaan unit-unit pada BUMDes sangat membantu memaksimalkan kinerja para pengurus dan kebutuhan masyarakat setempat. BUMDes Bangun Jaya terletak di Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang dan didirikan pada tahun 2018. BUMDes Bangun Jaya memiliki empat unit usaha yaitu, Sampah Berkah, WaSerDa Ben Berkah, Bumi Perumahan Kesongo dan Unit Daringan (Daringan Kesongo *Culture*). Unit daringan (Daringan Kesongo *Culture*) merupakan unit kuliner yang memberikan wadah bagi masyarakat desa untuk bisa melakukan penjualan dalam bentuk makanan dan minuman. Keberadaan unit ini memberikan keuntungan bagi masyarakat desa yang ada di Desa Kesongo.

Masalah-Masalah yang Dihadapi BUMDes

Pemahaman mengenai pengelolaan BUMDes sangat diperlukan untuk menambah pengetahuan bagi pengelola BUMDes dalam memperkaya pengetahuan dan manajerial dalam meningkatkan penjualan (Sanjaya *et al.*, 2020). Penguasaan kemampuan manajerial yang kurang memadai menjadi permasalahan dalam pengelolaan sebuah usaha. Struktur dalam pembagian tugas dan wewenang sangat diperlukan dalam kepemimpinan (Mukhzarudfa *et al.*, 2021). Bimbingan yang diberikan oleh pemerintah berupa pelatihan diperlukan untuk membantu meningkatkan kualitas pengurus. Pengembangan potensi desa sangat tidak mudah karena melibatkan masyarakat (Sulaksana *et al.*, 2019). Masyarakat perlu diberikan sosialisasi dan juga pelatihan untuk merubah cara berfikir sehingga bersedia mengelola potensi yang dimiliki oleh desa bersama-sama. Pengurus BUMDes harus mampu melihat peluang dan pintar dalam mencari cara untuk melakukan promosi. Promosi merupakan salah satu kesulitan yang dihadapi oleh pengurus BUMDes. Tidak hanya pengelolaan secara organ-

isasi, pengelolaan keuangan juga diperlukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya yang terjadi pada sebuah BUMDes. Laporan keuangan sangat perlu dilakukan sebagai tolak ukur untuk mengetahui kondisi kinerja dari suatu organisasi. Informasi yang didapatkan dari laporan keuangan mempermudah dalam pengambilan keputusan yang berguna bagi perkembangan suatu perusahaan (Puspitasari, 2021). Laporan tersebut digunakan untuk mengevaluasi kesehatan keuangan dan mengetahui pendapatan yang berpotensi untuk meningkatkan pemasukan. Laporan keuangan mempunyai tiga laporan utama, yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Kondisi yang sering terjadi pada sebuah laporan keuangan adalah selisih kas. Selisih kas merupakan catatan akuntansi yang mengalami kelebihan atau kekurangan kas. Selisih kas dibagi menjadi dua, yaitu selisih kas lebih (*cash overage*) dan kas kurang (*cash storage*)

Selisih Kas

Selisih kas ditandai dengan saldo hasil dari pencatatan pada laporan akhir yang tidak sama dengan bukti kas fisik yang ada. Selisih kas terjadi karena adanya kekeliruan berupa kesalahan input ketika transaksi berlangsung dan kesalahan dalam memberikan kembalian kepada pembeli. Penyebab selisih kas bisa berupa kesalahan input, mulai dari nama akun dan juga nominal yang tidak sesuai. Ada dua jenis selisih kas, yaitu selisih kas lebih (*cash overage*) atau selisih kas kurang (*cash storage*). Selisih kas lebih (*cash overage*) merupakan keadaan ketika catatan keuangan lebih kecil dibanding kas fisik yang ada (Gambar 1).

NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
Kas	xxxxxx	
Selisih Kas		xxxxxx

NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
Selisih Kas	Xxxxxx	
Kas		xxxxxx

Gambar 1. Pencatatan Selisih Kas

Selisih kas kurang (*cash shortage*) adalah keadaan jika catatan keuangan saldo lebih besar dibanding kas fisik yang dimiliki. Selisih kas ku-

rang (*cash shortage*) merupakan keadaan ketika catatan keuangan lebih besar dibanding kas fisik yang ada.

Dalam operasionalnya, setiap unit BUMDes harus memiliki prosedur tersendiri untuk menangani setiap kasus selisih kas yang ada. Tujuan dari manajemen risiko selisih kas adalah untuk mengurangi intensitas kesalahan yang timbul dalam pencatatan laporan keuangan. Adapun SOP yang seharusnya dimiliki oleh bumdes antara lain yakni: 1) Apabila terdapat kekurangan atau kelebihan pada mesin kasir, maka kasir dan pengelola sistem wajib menginformasikan kepada pengelola BUMDes Kesongo. 2) Jika terjadi selisih kas karena kelalaian atau kekeliruan kasir dan sistem administrator saat berhadapan dengan pembeli, wajib menggantinya saat itu juga. 3) Jika terdapat selisih kelebihan kas, maka tidak disimpan sebagai kas dan bank, namun memasukkannya ke dalam amplop dengan anggapan kelebihan kas tersebut merupakan dana cadangan yang sewaktu-waktu dapat digunakan. 4) Selisih kelebihan kas akibat pembulatan pembayaran atau setoran yang dimasukkan kependapatan non operasional (laba/rugi) bank. 5) Jika terdapat kelebihan selisih kas yang tidak dapat ditemukan pada hari yang sama, maka harus di rekening perantara (misal kelebihan selisih kas). 6) Jika penyebab selisih kas tidak ditemukan dalam jangka waktu tertentu (misalnya 1 bulan) (misalnya kesalahan salah buku atau keluhan pelanggan), pembukuan dapat diseimbangkan dengan menempatkan nominal selisih kas lebih ke pendapatan non operasional (laba/rugi) setelah menerima persetujuan direktur utama. 7) Penyelesaian selisih uang kas lebih harus diputuskan berdasarkan kasus per kasus dan pemotongan tambahan (kompensasi) untuk selisih uang pada hari lain tidak dapat dilakukan. 8) Perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) terhadap selisih kas lebih dengan jurnal pembukuan.

3. Data dan Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan observasi. Penelitian kualitatif dengan pendekatan observasi ini dilakukan untuk mengungkapkan sesuatu secara apa adanya. Penelitian ini dilakukan di unit daringan BUMDes Kesongo yang berada di Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

sekunder dan melakukan wawancara dengan pihak unit daringan BUMDes Kesongo secara langsung ke lapangan. Data ini diperoleh dari laporan keuangan unit Daringan periode Agustus-Desember 2021 dan bukti-bukti transaksi kas masuk dan kas keluar. Data tersebut diperoleh dari pengurus unit Daringan (Daringan Kesongo Culture).

Pengumpulan data dilakukan dengan meminta bukti-bukti transaksi, seperti transaksi masuk dan keluar per hari, melakukan cash opname, dan mengkonfirmasi kembali mengenai hasil dari cash opname yang dibandingkan dengan laporan sebelumnya, dan selanjutnya didiskusikan dengan pengurus unit daringan. Cash opname dilakukan dengan membuat jurnal umum. Jurnal umum ini mencatat transaksi yang terjadi setiap harinya untuk mengetahui saldo sebenarnya. Setelah saldo hasil *cash opname* diperoleh, saldo akhir yang didapatkan dan setelah melakukan *cash opname* akan dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya. Jika terdapat perbedaan saldo akhir antara saldo yang diperoleh melalui cash opname dengan laporan unit daringan akan diobservasi lebih mendalam dengan menggunakan teknik wawancara agar dapat mengetahui secara spesifik mengenai kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan selisih kas dan juga memberikan pengendalian terhadap unit daringan dari BUMDes Kesongo. Teknik analisis data penelitian kali ini disajikan dengan teknik deskriptif yakni mengungkapkan dan menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi pada kondisi saat sebenarnya. Terdapat tiga alur kegiatan dari aktivitas analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

4. Hasil

Gambaran Objek Penelitian

BUMDes Bangun Jaya terletak di Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang dan didirikan pada tahun 2018. BUMDes Bangun Jaya memiliki empat unit usaha yaitu, Sampah Berkah, WaSerDa Ben Berkah, Bumi Perkemahan Kesongo dan Kesongo Culture. Namun, sayangnya untuk Bumi Perkemahan Kesongo belum ada terdapat kegiatan bisnis. Untuk WaserDa Ben Berkah pun untuk saat ini kondisinya terpisah dari BUMDes Bangun Jaya karena selama pandemi Covid-19 beralih fungsi menjadi distributor bantuan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), walaupun pengelolaannya masih sama namun

kepengurusan secara administrasi terpisah. Unit daringan (Daringan Kesongo Culture) BUMDes Kesongo bertempat di Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Unit ini bergerak dibidang kuliner. Dalam menjalankan unit usahanya, semua barang ataupun makanan / minuman yang diperjualbelikan merupakan titipan pedagang yang merupakan warga desa Kesongo BUMDes Kesongo menggunakan 3 (tiga) komputer kasir untuk melayani penjualan dengan menggunakan aplikasi POS. Keberadaan unit ini memberikan keuntungan bagi masyarakat desa yang ada di Desa Kesongo. Unit daringan merupakan salah satu dari banyak unit yang ada di BUMDes Kesongo. Unit ini bertempat di Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Unit ini merupakan unit yang baru saja opening pada tanggal 15 Agustus 2021. Unit ini bergerak dibidang kuliner. Dalam menjalankan unit usahanya, makanan / minuman yang diperjualbelikan merupakan titipan pedagang yang merupakan warga desa Kesongo. Unit daringan BUMDes Kesongo menggunakan cash basis yang pencatatannya dicatat pada saat diterima atau dibayarkan.

Pada unit daringan terdapat 2 alur transaksi yakni penerimaan kas dan pengeluaran kas. Alur penerimaan kas unit daringan pada BUMDes kesongo berasal dari transaksi pembelian pelanggan. Adapun pengeluaran kas pada unit daringan adalah kebutuhan untuk membeli barang dagangan yang akan dijual kepada pelanggan. Dalam unit desa daringan terdapat beberapa posisi untuk mengendalikan kas masuk dan kas keluar, diantaranya adalah kasir, admin, bendahara dan direktur BUMDes. Gambar 2 merupakan alur penerimaan kas dan pengeluaran kas. Dalam *flowchart* tersebut dapat dilihat jika terdapat beberapa proses pencatatan siklus akuntansi mulai dari input catatan penjualan hingga pembuatan laporan keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes

Pelaporan pada BUMDes Kesongo dilakukan oleh masing-masing unit usaha yang kemudian diserahkan kepada bendahara desa. Pencatatan dilakukan secara manual dan belum dilakukan secara terperinci. Pada unit usaha Daringan sudah terdapat pencatatan yang terperinci mengenai jumlah kas masuk dan keluar setiap bulannya, sehingga dalam perancangan pembukuan hanya menggunakan perkiraan jumlah kas masuk dan kas keluar setiap bulannya. Meski demikian, pencatatan yang dilakukan unit usaha

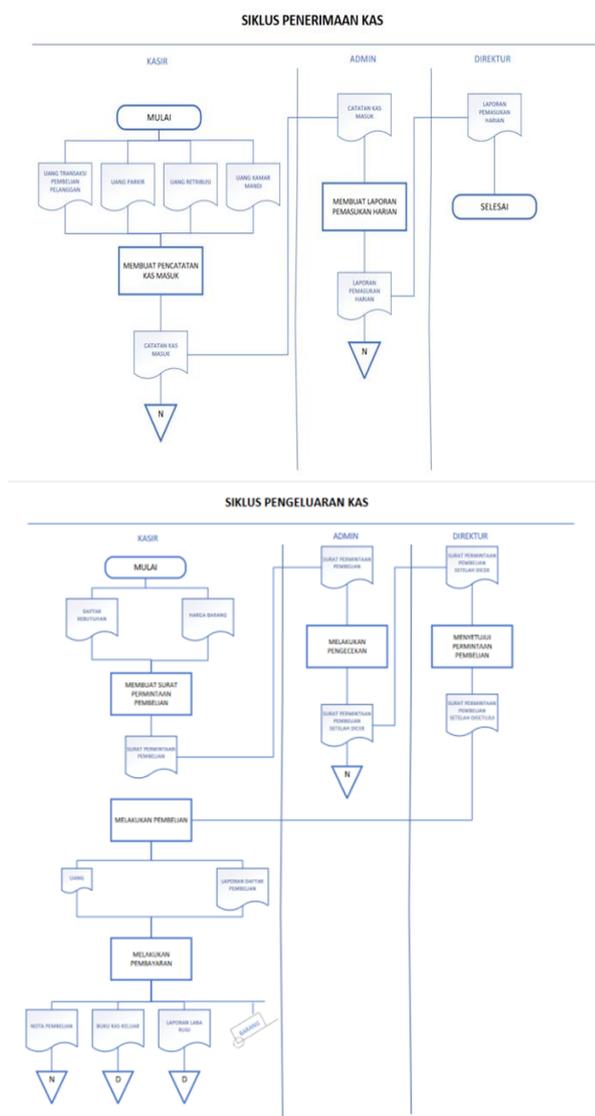
Daringan masih menggunakan metode cash basis yang hanya mencatat berapa jumlah kas yang benar-benar dikeluarkan maupun diterima pada tiap harinya. Unit usaha daringan ini baru mulai beroperasi sejak 15 Agustus 2021 sehingga pelaporan keuangan masih benar-benar baru dan masih mencoba mencari bagaimana bentuk pelaporan keuangan yang baik. penetapan SK ketua atas unit daringan dimulai sejak 15 agustus 2021. Dengan adanya penetapan SK tersebut maka terciptalah suatu SOP mengenai adanya penyusunan format dasar pelaporan akuntansi dan keuangan desa yang lebih mudah dipahami bagi pengurus BUMDes khususnya unit usaha daringan.

Model format yang digunakan pada dasarnya merupakan hasil pemikiran bendahara BUMDes yang membuat tampilan laporan keuangan unit daringan lebih mudah ia pahami. Penyusunan laporan keuangan akan di umumkan di balai desa BUMDes didepan banyak orang secara langsung untuk memenuhi aspek transparansi. Adapun urutan pelaporan laporan keuaangan yang didapati unit daringan dimulai dari adanya transaksi penerimaan kas yang terjadi di kasir menggunakan sistem. Setelah masuk maka transaksi tersebut akan direkap dan diserahkan kepada ketua BUMDes sehingga dapat direkap dan dijadikan output dalam bentuk laporan keuangan. Adapun referensi penyusunan format laporan yang unit daringan guankan yakni PP No. 11 Tahun 2021. Terdapat 2 jenis pelaporan keuangan yang wajib disetorkan BUMDes termasuk unit-unitnya yakni laporan periode semesteran dan laporan periode tahunan.adapun dalam proses pemilihan fungsionaris keuangan BUMdes disetiap unit BUMDes dan di BUMDes pusat memiliki karakteristik bagi mereka yang mampu menyusun laporan keuangan sederhana dan terbuka untuk mengikuti BIMTEK.

BIMTEK merupakan sejenis pelatihan bagi BUMDes di Kabupaten Semarang dan sekitarnya untuk dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan format yang ditetapkan dalam akuntansi dana desa. Dalam hal penyusunan laporan keuangan pihak BUMDes mengaku jika mereka mempermudah penyusunan laporan keuangan mereka dengan hanya menampilkan kas dan laba rugi pada neraca mereka sehingga mereka dapat melihat apakah usaha mereka mendapatkan untung atau rugi. Hal ini didukung dari pernyataan Bapak Haryono selaku Direktur BUMDes “awal penyusunan format laporan keuangan sebenarnya mengacu pada hasil BIMTEK, tapi saya sederhanakan karena kan kita butuhnya hanya melihat untung dan rugi saja.” Format laporan yang diberikan pemerintah pusat untuk dijadikan acuan memiliki komponen dari penyusunan jurnal umum, buku besar, neraca, laporan laba rugi hingga laporan perubahan modal.

Proses Penyusunan Laporan Keuangan dan Perlakuan Akuntansi

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2 (2012), kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Kas di tangan terdiri dari saldo kas dan rekening gi-



Gambar 2. Flow Chart Arus Kas Masuk dan Kas Keluar

ro. Kas merupakan aset jangka pendek yang digunakan sebagai alat pembayaran, sebagai dasar pengukuran akuntansi, dan sebagai laporan untuk semua pos lainnya. Dalam neraca, kas adalah aset yang paling sering berubah dalam artian paling sering berubah. Hampir setiap transaksi dengan pihak luar selalu melibatkan uang tunai. Uang tunai juga merupakan aset yang tidak produktif, sehingga harus disimpan sedemikian rupa agar persediaan uang tunai tidak menjadi terlalu besar dan tidak adanya idle cash. Daya beli uang bisa bermacam-macam, bisa naik atau turun, tetapi tidak mengakibatkan penilaian kembali terhadap kas.

Dalam Standar Akuntansi Keuangan nomor 1 dikatakan jika suatu laporan keuangan harus disajikan secara terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan juga menunjukkan tanggung jawab manajemen atas penggunaan sumber daya yang sudah dipercayakan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas.

Pada saat menyusun laporan keuangan pada unit daringan, terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan oleh setiap fungsionaris unit Daringan. Pertama-tama kasir akan merekap seluruh transaksi yang terjadi selama satu hari dengan menggunakan bantuan sistem aplikasi. Rekap tersebut akan di akumulasikan selama 1 bulan dan kemudian di serahkan kepada Direktur BUMDes melalui admin. Admin akan akan menginput transaksi tersebut menjadi laporan harian dan laporan bulanan ke dalam microsoft excel. Setelah dimasukkan ke dalam microsoft excel data akan diolah untuk mendapatkan laporan yang dibutuhkan seperti laba rugi. Data yang terolah diberikan kepada Direktur BUMDes dan kemudian akan disesuaikan format pelaporannya dengan format yang tertuang dalam PP No. 11 tahun 2021.

Dalam observasi awal yang dilakukan pada unit Daringan, terdapat selisih kas yang timbul dalam perhitungan *cash opname* pada unit daringan. Saldo akhir yang ditemukan setelah dil-

akukan *cash opname* sebesar Rp. 43.264.893. Selisih yang dilaporkan sejumlah Rp. 88 untuk saldo di bank dengan rincian saldo hanya sebesar Rp. 43.264.805 dan selisih saldo ditangan sebesar Rp. 24.693 dengan rincian saldo Rp. 43.240.200. Adapun setelah dilakukan wawancara Bapak Haryono mengungkapkan jika selisih kas kas ditangan dan hasil *cash opname* terjadi karena adanya salah input transaksi sepanjang Desember 2021. Bapak Haryono mengatakan "selisih kas 24.693 ribu itu karena kita kasir kita salah memberi harga mba, seharusnya barang tersebut harga 36.000 secara satuan namun hanya dijual 24.693 yang dibulatkan oleh kasir kami menjadi 24.700." Dari adanya kesalahan tersebut akuntansi memandang kesalahan tersebut sebagai selisih kas yang harus dibenarkan dan harus diberi jurnal koreksi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan pihak BUMDes atau Bapak Haryono mengaku belum memahami adanya kewajiban untuk menyusun laporan selisih kas karena beliau hanya menganggap fenomena tersebut wajar dan nantinya akan beliau ganti, mengingat beliau menjabat sebagai direktur BUMDes. "Kas kurang dianggap kerugian contohnya pedagang jumlah barangnya 10, laku semua, namun yang tercatat 7 kemungkinan ada pembeli yang tidak bayar atau lupa input. Kalo dalam kasus yang selisih tadi itu karena kesalahan kasir. Semuanya nanti akan saya ganti untuk menanggung kerugian atau selisih tersebut, saya tidak tahu kalo harus melakukan pencatatan selisih kas karena itu hal yang wajar yang penting nanti saya ganti."

Adapun upaya yang dilakukan untuk menelusuri bukti selisih kas yang dilakukan oleh pihak BUMDes adalah dengan menelusuri transaksi yang terjadi di bulan yang mengalami selisih kas ditangan. "biasanya kami melakukan penelusuran transaksinya contohnya kalo belum tercatat cari bukti transaksinya, gesernya itu kelihatan karna pencatatan selalu berkesinambungan didata yang ada. Adanya mutasi yang salah pencatatan terlihat, dan dilakukan tarik mundur kebelakang". Upaya yang dilakukan pihak BUMDes merupakan upaya detektif. Adapun upaya korektif dengan membuat catatan selisih kas masih belum dilakukan mengingat minimnya pengetahuan fungsionaris BUMDes dalam menyusun laporan keuangan yang baik dan benar. Upaya preventif yang dilakukan pengelola BUMDes sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan adalah dengan menyerahkan seluruh tugas kepada Bendahara BUMDes yakni Bapak

Haryono karena dinilai memiliki pengalaman lebih dalam mengelola uang kas BUMDes. Upaya Preventif ini dilakukan untuk menghindari adanya kas yang digunakan tidak sebagaimana mestinya.

Tantangan dan Hambatan dan Upaya Penanggulangan Selisih Kas

Berkeenaan dengan tanggung jawab yang diemban oleh Bapak Haryono, beliau mengungkapkan jika tidak terdapat kendala yang ia hadapi "Selama penyusunan kendala tidak ada, kalau pun ada masalahnya masih bisa dicari dan ditelusuri, contohnya seperti pembelian laptop uangnya sudah dikeluarkan tapi belum dilakukan pencatatan". Berkaitan dengan tantangan dan hambatan lain dalam selisih kas beliau juga tidak menemukan adanya kesulitan karena menurut beliau penyusunan laporan keuangan mereka telah sesuai dengan apa yang disampaikan pada BIMTEK. Namun dari hasil wawancara yang dilakukan, terdapat ketidaksesuaian praktik pencatatan laporan keuangan khususnya laba rugi dengan selisih kas yang ada, hal tersebut menjadi hambatan bagi BUMDes yang mana jika terjadi selisih kas yang cukup banyak akan menyebabkan kerugian bagi Bapak Haryono karena beliau yang menggantinya. Tantangan dan hambatan lainnya yang tidak diungkapkan oleh pengelola BUMDes adalah berkaitan dengan literasi penyusunan keuangan yang sangat kurang memadai bagi para pengelola BUMDes khususnya unit daringan. Meski pengelola keuangan unit Daringan tidak menemui hambatan namun dari hasil observasi yang kami lakukan Bapak Haryono sedikit kesulitan menganalisis komponen laporan keuangan BUMDes karena latar pendidikan beliau bukan berasal dari satuan pendidikan akuntansi. Literasi yang kurang memadai ini menyebabkan bentuk pencatatan laporan keuangan cukup sederhana sesuai dengan arahan BIMTEK.

5. Discussion

Bentuk Penyelesaian Selisih Kas Unit Daringan

Akuntabilitas bumdes dapat berbentuk akuntabilitas finansial dan administratif. Bentuk akuntabilitas finansial seperti menerbitkan laporan penyerapan anggaran dan laporan tahunan kepada masyarakat. Sedangkan bentuk akuntabilitas administratif adalah melakukan pelaporan

kegiatan tahunan kepada. Hal ini juga ditegaskan dalam Permendes PDTT No.4/2015 Pasal 12 bahwa pelaksana operasional bumdes berwenang menyusun laporan keuangan setiap bulan, melaporkan dan memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha bumdes. Penyampaian informasi kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun, contohnya seperti informasi mengenai selisih kas.

Adapun hasil penelitian kali ini mendapati jika bentuk penyelesaian selisih kas pada unit Daringan adalah dengan upaya korektif yakni mengganti selisih kas yang ada tanpa mencatatnya. Kekeliruan dalam pencatatan laporan keuangan BUMDes Unit Daringan akan berimbas kepada kerugian Bendahara karena selalu mengganti selisih kas yang ada. Selisih kas kurang (*cash shortage*) adalah keadaan jika catatan keuangan saldo lebih besar dibanding kas fisik yang dimiliki. Selisih kas kurang (*cash shortage*) merupakan keadaan ketika catatan keuangan lebih besar dibanding kas fisik yang ada. Dalam kasus unit daringan BUMDes kesongo seharusnya menyusun jurnal untuk mencatat selisih kas yang mana selisih kas harus dicatat di sisi debit dan kas dicatat di sisi kredit. Selisih kas sebesar Rp. 24.693 di sisi debit dan kas sebesar Rp. 24.693 di sisi kredit.

Dalam praktik akuntansi keuangan, pencatatan selisih kas membutuhkan yang namanya jurnal koreksi. Apabila ada selisih kas yang terjadi karena kesalahan pencatatan atau sebab-sebab yang sama sekali tidak dapat diketahui maka untuk memperbaikinya harus dibuat jurnal koreksi atau jurnal perbaikan. Selisih kas, digunakan untuk menampung perbedaan jumlah fisik kas berdasarkan cashopname dengan jumlah kas menurut catatan pembukuannya. Hal ini bersifat sementara saja, sebelum sebab terjadinya selisih ditemukan. Setelah dilakukan wawancara pihak BUMDes bersedia untuk melakukan pencatatan selisih kas yang diusulkan.

Upaya Pengendalian Selisih Kas

Dalam praktik akuntansi, kas adalah aktiva yang paling likuid, merupakan media pertukaran standard dan dasar pengukuran serta akuntansi untuk semua pos-pos lainnya. Kas harus memiliki pengawan tersendiri untuk mencegah adanya selisih kas yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja. Sehingga terdapat beberapa upaya yang seharusnya dilakukan BUMDes untuk

mencegah selisih kas terjadi secara terus-menerus diantaranya yakni adalah pengawasan internal dengan metode Preventif, Detective dan Korektif. Pengawasan Internal merupakan pengawasan akuntansi yang berkaitan dengan pengamanan kekayaan perusahaan, menjamin ketelitian dan dapat dipercaya/tidaknya data akuntansi. Pengawasan internal mencakup pengawasan administrasi yang berkaitan dengan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen.

Upaya lain yang belum dilakukan oleh BUMDes adalah upaya korektif dengan membuat rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah skedul yang menjelaskan setiap perbedaan antara catatan kas bank dengan catatan kas perusahaan. Apabila perbedaan yang terjadi hanya berasal dari transaksi yang belum dicatat oleh bank, maka catatan kas yang dibuat oleh perusahaan dianggap benar. Namun jika beberapa bagian dari perbedaan itu berasal dari pos-pos lain, maka catatan bank atau catatan perusahaan harus disesuaikan. Sebagai bentuk pengawasan untuk mencegah adanya selisih kas yang berkesinambungan secara terus menerus, pihak BUMDes dapat melakukan pengendalian detective yakni dengan giat mengikuti BIMTek dan membaca modul pembukuan sederhana yang sesuai dengan BUMDes. Upaya penanggulangan tersebut dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Pengelolaan keuangan yang akuntabel merupakan kewajiban organisasi pemerintah dan badan-badan yang terkait dengannya, seperti badan usaha milik desa (bumdes). *New public management* mengamanatkan akuntabilitas yang menekankan pada praktik kontrol anggaran dan transparansi keuangan. Bentuk preventif yang dilakukan untuk mencegah adanya selisih kas yang terus menerus juga dapat dilakukan dengan metode SOP yang jelas sehingga kasir, admin dan bagian keuangan BUMDes dapat bertanggung jawab atas selisih kas yang ada

6. Conclusion and Suggestion

Conclusion

Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa poin yang dapat ditarik kesimpulan bahwasanya BUMDes Kesongo khususnya unit Daringan memiliki masalah dalam hal pencatatan transaksi mereka. Dalam observasi awal yang dilakukan pada unit Daringan, terdapat selisih kas yang timbul dalam perhitungan cash opname pada unit daringan. Saldo akhir yang ditemukan setelah dilakukan cash opname

sebesar Rp. 43.264.893. Selisih yang dilaporkan sejumlah Rp. 88 untuk saldo di bank dengan rincian saldo hanya sebesar Rp. 43.264.805 dan selisih saldo ditangan sebesar Rp. 24.693 dengan rincian saldo Rp. 43.240.200. Selisih kas tersebut tidak dicatat sesuai dengan kaidah akuntansi yang berlaku karena kurangnya pemahaman pengelola keuangan BUMDes terkait pencatatan transaksi selisih kas yang ada. Dalam Praktiknya, selisih kas hanya dicatat secara sederhana kemudian selisih kurang dibebankan kepada bendara BUMDes dan jika selisih lebih maka akan dimasukkan ke dalam anggaran berikutnya.

Suggestion

Adapun saran yang dapat diusulkan bagi unit Daringan adalah dengan memperbaiki pencatatan selisih kas dengan metode yang diusulkan serta memperbaiki upaya pengendalian transaksi selisih kas secara perlahan mulai dari pengendalian preventif, detektif dan korektif. Bagi pemerintah Kab. Semarang hendaknya dapat menggenjot literasi pencatatan transaksi khususnya dalam lingkup selisih kas dalam materi BIMTek yang diikuti seluruh fungsionaris BUMDes.

References

- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *JDEB*, 13(1), 67-81.
- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus*, 28(2), 155. <https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848>
- Astuti, S. B., Damayanti, A., Chasbiandani, T., & Rizal, N. (2020). Pandemi Covid-19 Dalam Penyajian Pelaporan Keuangan dan Keberlangsungan Usaha Melalui Prediksi Kebangkrutan. *AFRE Accounting and Financial Review*, 3(2), 165-171.
- Darnilawati, D., Nuryanti, N., & Lubis, H. (2021). Literasi Keuangan Syariah Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Se-Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *Menara Riau*, 15(2), 66. <https://doi.org/10.24014/menara.v15i2.13988>
- Erlina, E., & Sirojuzilam, S. (2020). Efektivitas Penerapan Sistem Pencatatan Dan Pelaporan

- Keuangan Bumdes Sistem Akuntansi Bumdes Berbasis Web. *Owner*, 4(1), 282. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.195>
- Faedlulloh, D. (2018). BUMDes dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris. *Journal of Governance*, 3(1), 1-17. <https://doi.org/10.31506/jog.v3i1.3035>
- Hamzah, A. P., Priharjanto, A., & Purwanti, D. (2019). Pendampingan Perancangan Kebijakan Akuntansi Berdasarkan Sak Etap Dalam Pelaporan Keuangan Pada Bumdes Tirta Mandiri, Desa Ponggok, Klaten. *KUAT : Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, 1(3), 198-214. <https://doi.org/10.31092/kuat.v1i3.634>
- Hapsari, A. N. S., Utami, I., & Kean, Y. Y. W. (2021). Revealing the potential of fraud in the financial management of village-owned enterprise. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 25(1), 98-105. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol25.iss1.art10>
- Kesa, D. D. (2019). Cohesiveness Dan Peran Literasi Keuangan Dalam Meningkatkan Competitive Advantages Bumdes Merealisasikan Produk Unggulan Wisata Situ Cisanti. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 2(1). <https://doi.org/10.7454/jabt.v2i1.80>
- Kustinah, S., Hartikayanti, H. N., & Winarso, E. (2022). BUMDes Management Through Accounting Information Systems at BUMDes in Cisarua District, West Bandung District. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 532-542. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v4i2.5240>
- Mawardi, A. I., & Firmansyah, A. (2023). Analisa Faktor Literasi Keuangan Pada Pelaku UMKM Perempuan Di BUMDES Wonosari Mojokerto. *JPE: Jurnal Peneliti Ekonomi*, 1(2), 97-111. <https://jurnaljpe.com/index.php/jpe/article/view/52%0Ahttps://jurnaljpe.com/index.php/jpe/article/download/52/38>
- Mukhzarudfa, M., Putra, W. E., Afrizal, A., Susfayetti, S., & Yuliusman, Y. (2021). Perencanaan Dan Pengelolaan Keuangan Bumdes Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(3), 477-483. doi: [10.22437/jkam.v4i3.11565](https://doi.org/10.22437/jkam.v4i3.11565)
- Nursidaa, N., Mochtarb, R. A. F., Nu, M., & Sagalad, H. (2023). Literasi Laporan Keuangan Bumdes Pada Bumdes Bumi Mulya Desa Gunung Mulya Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Literacy Of Bumdes Financial Reports In Bumi Mulya Bumdes In Gunung Mulya Village , Gunung Sahilan District , Kampar District BUMDes adalah. 4, 123-128.
- Pamungkas, A. P., & Kristianti, I. (2019). Persepsi, Pengetahuan Akuntansi dan Pengalaman Usaha Terhadap Penggunaan Informasi Pada UMKM. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 2(2), 107-112. <https://doi.org/10.26905/afr.v2i2.3729>
- Penatari, R. I., Setiawan, D., & Suhardjanto, D. (2020). Dinamika Penelitian Sistem Informasi Akuntansi Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 159-177. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.1.10>
- Pradnyani, N. L. P. S. P. (2019). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara. *Jurnal Riset Akuntansi JUARA*, 9(2), 39-47.
- Prasetyo, R. A. (2016). Peranan BUMDES Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Dialektika*, XI no.1(May).
- Ridwan, T., Nursandi, D., Winda Lestari, E., SulTony, F., Fajar, I., Agusetiawati, I., Melinda, M., Selvina, N., Azizah, N., & Syifa, S. (2021). Potensi UMKM dalam Penguatan BUMDES Desa Cempaka dengan Pendekatan ABCD di Era Pandemi COVID-19. *COMSERVA: Indonesian Journal of Community Services and Development*, 1(4), 150-158. <https://doi.org/10.36418/comserva.v1i4.20>
- Riyanti, N., & Adinugrah, A. H. (2021). Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Singajaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Bodas Kecamatan Watukumpul). *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), 80-93. <https://doi.org/10.35316/idarah.2021.v2i1.80-93>
- Sanjaya, P. K. A., Hartati, N. P. S., & Premayani, N. W. W. (2020). Pemberdayaan Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdikari

- Melalui Implementasi Digital Marketing System. *Carrade: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 65-75. Retrieved from <https://journal.ilinstitute.com/index.php/caradde%0Ahttps://doi.org/10.31960/caradde.v3i2.467>
- Septina, N., Djajadikerta, H., Setiawan, A., & ... (2021). Pelatihan Daring Financial Life Skills: Alternatif Literasi Keuangan Di Masa Pandemi. *Pengabdian ...*, 1(1), 50-56. <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/PBS/article/view/9825>
- Sidik, F. (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(2), 115. <https://doi.org/10.22146/jkap.7962>
- Sulaksana, J., & Nuryanti, I. (2019). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kasus Di Bumdes Mitra Sejahtera Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 3(2), 348-359. doi: 10.21776/ub.jepa.2019.003.02.11
- Sulistiani, D. (2021). Penerapan Akuntansi Akruial pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Berstatus Badan Layanan Umum. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 4(1), 18-28. <https://doi.org/10.26905/afr.v4i1.5958>
- Usman, U. (2023). Pengaruh Akuntabilitas dan Pengawasan Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Bumdes di Kecamatan Kabila Bone Provinsi Gorontalo *The Influence of Accountability and Internal Supervision on Bumdes Financial Management in Kabila Bone District , Gorontalo Provi.* 2(2), 63-76.
- Wahyuningsih, R., & Pradana, G. W. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Hendrosari Melalui Pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu. *Publika*, 9(2), 323-334. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p323-334>
- Wibowo, A. A., & Alfarisy, M. F. (2020). Analisis Potensi Ekonomi Desa Dan Prospek Pengembangannya. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 22(2), 204-216. <https://doi.org/10.32424/jeba.v22i2.1596>
- Widiastuti, H., Yunianto, A., & Rahmawati, E. (2022). Evaluasi Tata Kelola Keuangan dan Sistem Akuntansi di BUMDes Mekaring Pono Potorono. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 5(2), 131-143. <https://doi.org/10.18196/jati.v5i2.13485>
- Wirandini, D. A. S., & Prasetyia, F. (2022). Analisis Strategis Pengembangan BUMDES Dalam Peningkatan Pades Pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Development Economis and Social Studies*, 1(2), 230-242.
- Yanti, R. E., & Pratiwi, C. W. (2022). Factors Affecting the Quality of Accounting Information: the Role of Accounting Information Systems. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 14(1), 107-114. <https://doi.org/10.23969/jrak.v14i1.4432>
- Zulbetti, R., Perwito, P., & Puspita, V. A. (2019). Upaya Peningkatan Literasi Keuangan Pengurus BUMDES Melalui Pelatihan Keuangan di Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 19(2), 200-211. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v19i2.3824>